

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejatinya merupakan negara maritim (*maritime state*). Secara geografis Indonesia merupakan negara laut terbesar di dunia. Luas lautnya 3,1 juta km, dengan panjang garis pantai 81.000 km. Di tengah laut tersebut ditaburi 17.508 pulau besar dan kecil, (Dahuri dkk dalam Hamid, 2013, hlm. 1). Secara historis, dahulu Nusantara memang memegang peranan penting dalam aspek kelautan dengan menjadi lalu lintas atau jalur perdangan terpenting selain jalur sutera di darat yang menghubungkan Tiongkok, Indonesia, India, dan Eropa di Barat. Seperti yang diungkapkan Van Leur dalam Leirrisa dkk (2012, hlm. 12) dierangkan bahwa jalan yang melalui laut ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India dari sini ada yang ke Teluk Persia, melalui Suriah ke Laut Tengah, ada yang ke Laut Merah, melalui Mesir dan sampai Juga di Laut Tengah. Hal tersebut menunjukkan Indonesia mempunyai potensi kekuatan laut yang secara geografis yang dapat dimaksimalkan, baik dalam aspek ekonomi, politik, pertahanan, pariwisata, hingga bagaimana usaha untuk menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa dan bukan lagi sebagai pemisah.

Sebagai negara maritim atau negara kelautan, Indonesia memang memiliki budaya kelautan yang amat kaya. Budaya tersebut dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang memegang teguh pandangannya terhadap kearifan lokal di laut. Kelompok masyarakat tersebut adalah Suku Laut atau Orang Laut yang secara tidak langsung memang telah menjalin komunikasi antar pulau di belahan nusantara jauh sebelum jaringan perdagangan internasional ada. Orang Laut ataupun Suku Laut memiliki beberapa penyebutan seperti yang diungkapkan Anderbeck dalam makalah penelitiannya, (2007) yakni :

*These groups have been variously called Sea Tribes , Sea Nomads , Sea Gypsies ,Boat People, and, in Indonesian/Malay, Bajau (sea gypsies), Orang Laut (sea people), Orang Suku Laut (people of the sea tribes), Ra(k)yat Laut (sea subjects [to Malay rulers]) or Orang Perahu/Sampan (boatpeople) (hlm, 3).*

Menurut Worter dan Hall (dalam Fithrorozi, 2009, hlm. 42) menyatakan bahwa "...keberadaan Suku Laut telah dikenal sejak abad ke-14 di masa Sriwijaya. Bahkan Chou Chu Fei mencatat tradisi pengembaraan Suku Laut sudah berlangsung pada tahun 1178. Sedangkan catatan sejarah Chia Tan, Suku Laut sudah ada pada tahun 800". Beberapa dari Suku Laut yang terkenal di Indonesia dan telah banyak penelitian tentangnya adalah mengenai Suku Bajo di Sulawesi Selatan yang konon berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan. Keberadaan suku laut lain yang belum banyak diketahui dan sedikit penelitian tentangnya adalah Suku Sawang atau Suku Sekak yang berada dan tersebar di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Pulau Mendanau, Pulau Baguk, Juru Seberang, Ulim, Belantu, Gantung serta Manggar. Sama halnya dengan Suku Bajo, asal usul Suku Sawang ini diperkirakan berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan, menyebar ke Brunei, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaya hingga ke perairan kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Sejak abad ke-16 atau 17 Masehi terdapat kelompok yang menamakan dirinya orang-orang perahu, yang dalam publikasi Barat kelompok ini dikenal dengan nama *sea nomads*, *nomadic boat people*, *sea gypsies*; sedangkan para pedagang Portugis menyebut mereka *celates*. Orang Laut di Bangka Belitung dahulu dinamai *orang Sekak*, *Sekat*, atau *Sika*, namun penamaan *Sekak* tersebut kurang disukai oleh mereka karena mengandung arti "primitif" atau "terbelakang" sehingga mereka menamakan diri mereka sebagai Suku Sawang. Pendapat lain mengatakan bahwa Suku Laut di Belitung yang dikenal dengan sebutan Suku Sekak berasal dari Suku Sakai di Teluk Lanoa, Filipina. Pendapat lainnya mengacu pada struktur kelembagaan "*batin*" (Kepala Suku) Suku Sawang di Belitung identik dengan istilah "*batin*" dalam Suku Sakai (Salman, dkk, 2011, hlm. 127-128). Di Bangka, orang Sekak tercatat tinggal di Kuto Panji, Jebu Laut, Kudinpar, Lepar, dan Pongok. Di Belitung, orang Sekak tinggal di Juru Seberang, Kampung Baru, dan Gantung.

Mengenai asal Suku Sekak ini memang masih belum terungkap sepenuhnya dan masih menjadi bahan kajian dan penelitian. Keberadaan Suku Laut di Belitung setidaknya sudah diidentifikasi sejak masa ke-Depatian. Dalam

Rapport Depati tahun 1851 (*Staat van de Bevolking of Billiton-volgens de officiele opwage van den depatie in 1851*) disebutkan jumlah Suku Laut 1067 jiwa yang bermukim di Tanjungpandan, 123 di Sijuk, 464 di Belantu atau secara keseluruhan berjumlah 46,84% atau 1654 dari 3531 orang darat dan 29,73% dari total 5564 penduduk Belitung saat itu (Fitrorozi, 2009, hlm, 42). Suku Sawang sering disebut sebagai Suku Laut oleh masyarakat sekitar Pulau Belitung. Suku bangsa Sekak/Sawang ini sering juga disebut orang *Mapur, Lom, Belom*. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri mereka *Ameng Sewang*, yang artinya sama saja dengan “orang laut”. Nama Sekak diberikan oleh masyarakat Melayu sekitarnya. Menurut pengertian mereka, selain sekak artinya tuli, kata “*sekak*” berarti “tidak mau bergaul” dan berkonotasi merendahkan. Orang Sawang/Sekak termasuk suku bangsa kecil yang agak terasing dari pergaulan dengan suku bangsa lain. Mereka berdiam di beberapa tempat di pesisir Pulau Belitung dan pesisir utara Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Jumlah Populasinya sekitar 1.000 jiwa (1986) (Hidayah, 2015, hlm. 341).

Suku Sawang merupakan suku pendatang di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Mereka sudah lama menetap di Desa Selinsing Kecamatan Gantung sejak zaman penjajahan Belanda atau penjajahan Jepang. Suku Sawang diperkirakan berasal dari kepulauan Riau dan hidup berpindah-pindah (nomaden) di atas perahu (Kadir, 2013, hlm, 141). Pada wilayah Asia Tenggara terdapat tiga kelompok besar Suku Laut, dengan dua di antaranya hidup di Indonesia. Bajo terutama hidup di Sulawesi sampai ke Filipina. Moken hidup di pesisir barat Myanmar sampai Malaysia. Di sekitar perairan Riau sampai Kepulauan Bangka Belitung (Babel), hidup juga Orang Laut. Di Bangka Belitung, Orang Laut itu adalah Suku Sekak. Suku Sekak lebih dekat dengan orang Moken dibandingkan dengan Bajo. Antropolog maritim Universitas Tokyo, Akifumi Iwabuchi, (dalam radarbangka.co.id) menyebutkan, Moken dan Sekak sama-sama punya ritual Buang Jung. Ritual itu biasanya dihelat saat laut mulai tenang selepas musim barat. Secara geografis, lebih masuk akal bila Moken dan Sekak dekat. Pesisir Barat Myanmar sampai Belitung adalah jalur pelayaran internasional sejak masa silam. Jalur pelayaran itu memudahkan mereka bermigrasi.

Laporan komisaris Belanda untuk Belitung tahun 1803, JL Van Sevenhoven, menyebutkan, orang Sekak hidup di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dalam laporan terbitan 1867 itu disebutkan, orang Sekak adalah pemandu, penyelam, dan nelayan andal. Diperkirakan orang-orang laut itu sudah berada di sekitar Pulau Belitung sejak abad ke 16 atau 17 Masehi. Jasa mereka dimanfaatkan kapal-kapal dagang yang harus melewati Selat Bangka, jalur pelayaran internasional hingga awal abad ke-19. Di masa lalu, Selat Bangka masih dipenuhi lumpur di berbagai lokasi. Dibutuhkan pelaut yang mengerti kondisi perairan setempat agar pelayaran lancar. Pengetahuan atas kondisi perairan didapat dari pengalaman panjang orang Sekak melayari Selat Bangka. Namun, tidak ada catatan pasti kapan mereka mulai mempelajari Selat Bangka dan hidup di Babel. Menurut catatan buku karangan seorang Belanda John F. London pada tahun 1856 jumlah orang laut di Pulau Belitung melebihi penduduk lainnya, yaitu sekitar 2.600 jiwa yang dibagi atas beberapa suku dan kelompok dengan Kepala Suku (*Batin*) masing-masing (Bahari, 1987, hlm. 2).

Berdasarkan dari pengakuan orang Sekak sendiri yang berdasarkan lagu tradisi orang Sekak yakni *Campak Daik* menyebutkan asal usul nenek moyang suku Sesak ini sendiri berasal dari Lingga. Daerah yang kini menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Sejak berabad lampau, Daik adalah ibu kota Kesultanan Lingga. Daik menjadi ibu kota Kabupaten Lingga yang wilayah lautnya berbatasan dengan Bangka Belitung. Pada waktu Bangsa Portugis menyerang Tanah Melayu, orang-orang Laut turut berperang sebagai angkatan Laut Kerajaan Melayu. Pada saat itu mereka dipimpin seorang Panglima Kerajaan, melawan angkatan laut Portugis di Perairan Melayu. Karena terputus hubungan dengan pimpinan disebabkan kelelahan dalam pertempuran laut itu, maka kocar-kacirlah mereka dan terpencar-pencar di lautan luas, akhirnya yang terdampar dan menetap di pulau-pulau sekitar Malaya dan Riau. Mereka ini oleh orang Laut Belitung disebut orang Lingga (Bahari, 1987, hlm. 1).

Suku Sawang dahulu memang terkenal sebagai suku yang inferior dan suka memarginalkan karena lebih suku hidup di laut. Meskipun suku ini menyandang predikat inferior karena suka memarginalkan diri, tapi mereka tetap

berusaha menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan orang Melayu dan Tionghoa. Orang Melayu menganggap bahwa Suku Sawang adalah orang-orang yang tidak tahu tata krama, sehingga tak ayal mereka sering memperoleh stigma negatif dari masyarakat lokal. Hal itu perlu dimaklumi karena secara kultural dalam Suku Sawang memang tidak mengenal atau memegang prinsip *cultural power distance* yang menggambarkan adanya rentang kekuasaan hierarki seperti yang dideskripsikan melalui kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata (dalam Kadir, 2013):

Orang Sawang senang sekali memarjinalkan diri sendiri. Itulah sifat alamiah mereka. Bagi mereka hidup ini hanya terdiri atas mandor yang membayar mereka setiap minggu dan pekerjaan kasar yang tak sanggup dikerjakan suku lain. Mereka tak memahami konsep aristokrasi karena kultur mereka tak mengenal *power distance*. Orang yang tak memaklumi hal ini akan menganggap mereka tak tahu tata krama. Satu-satunya manusia terhormat di antara mereka adalah sang kepala suku, seorang *shaman* sekaligus dukun, dan jabatan itu sama sekali bukan hereditas (hlm. 142).

Sejak berdirinya pertambangan timah oleh Belanda tepatnya ketika masa-masa akhir penjajahan tahun 1936, banyak Orang Sawang yang terkenal ulet dan kuat ini dipekerjakan sebagai buruh tambang perusahaan timah Belanda. Pada tanggal 15 November 1860, perusahaan pertambangan timah berdiri dengan nama *Billiton Maatschappy*. Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta milik orang Belanda yang bekerja sama dengan Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Belanda. Pada tahun 1866, *Billiton Maatschappy* masih terus mendatangkan pekerja dari negeri Cina hingga berjumlah 2724 orang, dan pada tanggal 9 September 1924, *Billiton Maatschappy* berubah nama menjadi NV GMB atau *NV Gemeenschapelyke Mynbouw Maatschappy Billiton* (Guna, 2014, hlm. 28-29).

Pada tahun 1936 tersebut perlahan-lahan banyak Orang Sawang yang bekerja di perusahaan timah yang dikelola oleh Belanda sehingga sebagian besar Orang Sawang mulai bertempat tinggal jauh dari pantai. Selain dipekerjakan, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Belitung tersebut ternyata orang-orang Sawang tersebut juga telah dirumahkan atau diberikan tempat tinggal untuk pertama kalinya agar memudahkan mengontrol dan memobilisasi orang-orang laut dalam bekerja yang dipandang masih sebagai orang-orang yang primitif dan

terpencil. Perumahan yang didirikan ada di beberapa tempat seperti di daerah Belitung Timur yakni Desa Selingsing, Kecamatan Gantung yang masih bisa dilihat hingga kini berbentuk perumahan berbentuk huruf u. Selain di Desa Selingsing, terdapat juga perumahan di daerah Tanjung Pandan sebagai pusat kota yang cenderung dekat dengan laut. Perumahan yang dibangun di Birok tersebut adalah perumahan bedeng berbentuk rumah panggung di atas air. Adapun perumahan bedeng Suku Sawang di daerah Birok Tanjung Pandan sudah tidak bisa dilihat lagi bekasnya yang sekarang telah menjadi area Pelabuhan Tanjung Pandan. Sejak bekerja sebagai buruh tambang timah Belanda dan perlahan tinggal lama di daratan, Suku Sawang pun perlahan semakin intensif bersentuhan dengan kehidupan di daratan meskipun mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi lama mereka.

Kondisi tersebut serupa namun berbeda masa pemerintahan ketika adanya kebijakan pemerintah Belitung dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil tahun 1970-an, yang melakukan relokasi pemukiman ke darat yang telah mengubah pola pikir dan pola usaha Suku Laut (Salman, dkk, 2011, hlm. 128). Usaha pemberdayaan tersebut oleh Departemen Sosial dilaksanakan dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi Suku Laut yang dianggap terpencil. Usaha pemberdayaan yang dilakukan sejak tahun 1970 tersebut dilakukan dengan relokasi pemukiman yang diberi nama Kampung Laut. Upaya pemberdayaan yang kedua dilakukan sekitar tahun 1985 dengan membuatkan mereka rumah tinggal yang berdekatan dengan Sungai Cerucuk (Desa Juru Seberang). Pada mulanya rumah-rumah dihuni sekitar 100-an kepala keluarga namun kegiatan ini pun tampaknya tidak membuahkan hasil, lambat laun mereka meninggalkan rumah tersebut (Fithrorozi, 2009, hlm. 44).

Kontak kebudayaan yang terus menerus antara kebudayaan Suku Sawang dengan masyarakat pribumi Belitung di darat ditambah dengan pesatnya arus globalisasi dan modernisasi telah menyebabkan pergeseran serta perubahan sosial budaya suku tersebut. Sejarawan sekaligus budayawan, Akhmad Elvian (dalam Aktual.co, 2012) mengatakan:

Pemerintah pernah membuat konsep yang salah pada sekitar tahun 1978-an dengan menganggap Orang Laut atau Orang Sekak sebagai masyarakat terasing padahal sebenarnya tidak begitu. Pemerintah melakukan kesalahan konsep dengan "memaksa" mereka pindah ke daratan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Orang Laut hendaknya dibiarkan hidup di "jung" atau perahu secara berkelompok seperti layaknya kebudayaan asli mereka.

Sebagaimana juga yang dikutip dari Seorang peneliti asal Jepang, Profesor Antropolog maritim Universitas Tokyo Akifumi Iwabuchi yang memprakarsai pembentukan organisasi persatuan Suku Sekak yang merupakan penduduk asli Bangka Belitung (Babel) dalam Radar Bangka (2012) mengatakan:

Sekarang Orang Sekak dapat ditemukan hidup di rumah-rumah kayu di wilayah pesisir Bangka Belitung. Pada tahun 70/80-an, pemerintah Indonesia meminta orang Sekak untuk meninggalkan rumah perahu mereka untuk hidup di darat, sayangnya itu mengikis budaya Sekak. Kebudayaan Suku Sekak di Bangka Belitung sudah 70 persen hilang, jumlah mereka hanya sekitar 900 orang dan itu sudah merupakan campuran dengan Suku Melayu atau yang lain." kata Akifumi di Tanjungpandan, Belitung, Kamis (8/11).

Berdasarkan penelitiannya bahwa tinggal 20 persen dari sekitar 900 orang Suku Sekak yang bisa berbahasa Sekak, "...Mereka tidak tinggal merata di setiap daerah, itu membuat generasi muda yang sudah tidak memiliki tetua kesulitan untuk belajar mengenal kebudayaan mereka..." Beberapa contoh kepunahan budaya Sekak, kata Akifumi, selain dilihat dari sedikitnya penutur bahasa Sekak juga bisa dilihat dari hilangnya upacara-upacara adat Sekak seperti *Buang Patong* dan *Kundang Nambak*. Setelah tahun 60-an, tradisi itu hilang karena hampir semua Orang Sekak masuk Agama Islam dan upacara tersebut dianggap bukan ajaran Islam. Suku Sekak mendiami daerah pesisir pantai dan mata pencaharian mereka adalah nelayan. Dulu hampir sebagian Orang Sekak hidup dan melakukan seluruh aktifitas di atas perahu. Akan tetapi lambat laun kehidupan perahu telah ditinggalkan Suku Laut tersebut karena mereka telah berasimilasi dengan suku lain seperti Melayu Bangka Belitung di daratan. Sekarang Orang Sekak dapat ditemukan hidup di rumah-rumah kayu di wilayah pesisir Bangka Belitung.

Dari tulisan Sesepuh Suku Sawang sendiri yakni Bahari (1987) dalam tulisannya menyatakan bahwa:

Dari tahun ke tahun jumlah tersebut semakin berkurang yang antara lain dikarenakan berbagai sebab, misalnya tidak terjaminnya segi kesehatan dan lingkungan, perkawinan campuran dimana setelah melalui 2 atau 3 generasi, sengaja atau tidak sengaja keturunan dari orang suku laut itu sudah melupakan asal usulnya karena merasa asal usulnya dianggap dirinya bukan orang laut lagi, selain dari itu faktor dari lingkungan karena ketertinggalan tidak membawa perkembangan selanjutnya sehingga perbandingan kelahiran dan kematian baik orang tua maupun anak-anak tidak ada perbandingannya ( hlm. 2).

Dikutip juga dari Kompas.com (2012) bahwa Akifumi menemukan fakta jumlah orang Sekak terus merosot. Ia tidak yakin akan bisa meriset kehidupan orang Sekak jika melakukannya 10 tahun mendatang. Tidak banyak lagi orang tahu soal adat istiadat orang Sekak. Pemuda-pemuda Sekak bahkan tidak bisa berbicara bahasa Sekak.

Berbagai hal yang penulis deskripsikan di atas menjadi latar belakang penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul “*Dari Lautan Ke Daratan: Dampak Kebijakan Tinggal di Darat Terhadap Kelestarian Budaya Suku Sawang Di Pulau Belitung (1936-2012)*”. Adapun yang menjadi fokus kajian penulis adalah dampak kebijakan tinggal di darat oleh pemerintah terhadap kelestarian budaya suku Sawang di Pulau Belitung yang lebih berfokus kepada perubahan sosial dan budayanya dari masa ke masa yakni dari zaman pemerintahan Hindia Belanda di Belitung hingga masa reformasi Indonesia hingga sekarang. Penulis mengambil lokasi penelitian di Belitung karena Pulau Belitung merupakan daerah yang dihuni oleh sebagian besar komunitas Suku Sawang yang masih tersisa selain di Pulau Bangka tepatnya di daerah Juru Seberang, Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pandan, dan di Desa Selingsing Kecamatan Gantung.

Alasan penulis mengangkat judul skripsi tersebut karena masih minimnya tulisan yang membahas mengenai keberadaan Suku Sawang beserta budayanya ini di Pulau Belitung terutama dalam kajian Historis-Sosio Antropologis. Penulis memilih awal kajian tahun 1936 karena pada masa-masa akhir pemerintahan Belanda tersebutlah, Orang Sawang perlahan mulai direkrut untuk bekerja di tambang timah yang dikelola Belanda dan pada saat yang sama juga Suku Sawang tersebut dirumahkan untuk pertama kalinya hingga perlahan menetap di darat. Pada tahun 1936 hanya sekitar separuh dari populasi orang Sawang yang bekerja

di pertambangan timah. Meskipun telah bekerja sebagai buruh pertambangan timah, orang-orang Sawang tersebut masih mempertahankan tradisi mereka melaut (Purwana, 2015, hlm. 186).

Usaha untuk merumahkan Suku Sawang tersebut pun kembali dilakukan namun kini berbeda motif dan pemerintahan. Pada tahun 1970-an, Pemerintah Belitung (yang pada waktu itu masih termasuk dalam Propinsi Sumatera Selatan) dalam program pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT) oleh Departemen Sosial yang sekarang adalah Kementerian Sosial (Kemensos), melakukan relokasi pemukiman ke darat yang telah mengubah pola pikir dan pola usaha Suku Laut.

Hingga akhirnya pada tahun 2012 Daerah Provinsi Bangka Belitung dinyatakan bebas daerah tertinggal atau daerah Komunitas Adat Terpencil (KAT) setelah sebelumnya dilakukan survey terakhir oleh Kementerian Sosial RI bahwa satu daerah di Kabupaten Belitung yaitu Desa Pulau Batu sudah bebas dari katagori daerah KAT yang diikuti dengan pemberhentian bantuan dana pemberdayaan KAT oleh pemerintah pusat. Untuk selanjutnya pemerintah secara permanen membangun perumahan yang layak bagi komunitas suku Sawang seperti di daerah Gantung yang pada tahun tersebut juga pariwisata Belitung amat berkembang pesat dimana suku Sawang beserta kebudayaannya adalah salah satu objeknya hingga Pemerintah Kabupaten Belitung menyatakan untuk melindungi kebudayaan suku Sawang ini dari kepunahan.

Alasan penulisan skripsi karena, *pertama* Suku Sekak beserta kebudayaannya adalah kekayaan budaya maritim Indonesia sebagai negara bahari yang hampir punah digerus zaman yang tentu harus dilestarikan serta masih amat sedikit informasi dan penelitian mengenai Suku Sawang ini terutama mengenai hubungan antara kondisi Suku Sawang yang tinggal di darat setelah dirumahkan dan dampaknya terhadap perubahan sosial-budaya suku tersebut kedepannya. *Kedua*, alasan pemilihan Pulau Belitung sebagai objek kajian adalah karena Pulau Belitung adalah daerah dimana terdapat sebagian besar komunitas Suku Sawang yang masih bisa dijumpai tepatnya di daerah Kampung Baru, Juru Seberang, Gantung. *Ketiga*, di kalangan Universitas Pendidikan Indonesia, terutama jurusan

Pendidikan Sejarah, penulisan karya ilmiah yang Historis-Sosio Antropologis mengenai dampak kebijakan tinggal di darat dan dampaknya terhadap kelestarian budaya Suku Sawang sebagai suku lokal Bangka Belitung masih belum banyak yang menulis. Berdasarkan alasan di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai dampak kebijakan tinggal di darat dan dampaknya terhadap kelestarian budaya Suku Sawang dilihat dari sudut pandang Historis-Sosio Antropologis yang mengambil objek kajian penelitian di Pulau Belitung.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk mendapatkan data dan fakta mengenai masalah yang dampak kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga pada masa Orde Baru melalui program KAT terhadap Suku Sawang yang berakhir pada tahun 2012. Melalui penelitian ini, bisa dipahami masalah-masalah dari dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang ini dan diharapkan nantinya memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah mengenai langkah selanjutnya dan perbaikan terhadap tiap kebijakan yang dilakukan terhadap suku laut tersebut untuk kedepannya dalam upaya pelestarian kebudayaan Suku Sawang di tengah arus globalisasi dan perkembangan pariwisata yang kian pesat di Pulau Belitung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang dikaji adalah *“Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan untuk tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang di Pulau Belitung tahun 1936-2012?”* Agar pembahasan lebih terfokus, maka penulis mengembangkannya dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang kehidupan Suku Sawang di Belitung sebelum tahun 1936?
2. Bagaimanakah dinamika kehidupan Suku Sawang Belitung pasca tahun 1936 sampai dengan tahun 1970?

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong diberlakukannya kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang oleh Pemerintah Daerah tahun 1970-2012?
4. Bagaimanakah kondisi sosial-budaya, dan ekonomi komunitas adat Suku Sawang pasca diberlakukannya kebijakan tinggal di darat bagi Suku Sawang di Belitung tahun 1970-2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang ada merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penulis. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan pelajaran berharga dari peristiwa sejarah di masa lampau agar menjadi pijakan dalam melangkah ke depan, sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memaparkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang oleh pemerintah daerah tahun 1936-2012. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai latar belakang kehidupan Suku Sawang di Belitung sebelum tahun 1936
2. Menjelaskan dinamika kehidupan Suku Sawang Belitung Pasca Tahun 1936 sampai dengan Tahun 1970
3. Menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mendorong diberlakukannya kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang oleh pemerintah daerah tahun 1970-2012
4. Menjelaskan bagaimana kondisi sosial-budaya, dan ekonomi komunitas adat Suku Sawang pasca diberlakukannya kebijakan tinggal di darat bagi Suku Sawang di Belitung tahun 1970-2012

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang oleh pemerintah tahun 1936-2012, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

## **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

- a. Dapat menjadi sebuah motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak dari pemberlakuan kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang oleh pemerintah dari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Belitung tahun 1936 hingga masa pemerintahan Republik Indonesia melalui program pemberdayaan KAT tahun 1970-2012 baik dari aspek sosial maupun budaya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan kontribusi untuk menambah referensi dan memperkaya penulisan sejarah lokal daerah Belitung itu sendiri. Selain itu juga penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah Belitung dengan penelitian yang dilakukan oleh putra daerah sendiri berkaitan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pemberlakuan kebijakan tinggal di darat terhadap eksistensi kebudayaan dan masyarakat suku Sawang sendiri yang perlahan terancam punah digerus zaman. Sehingga diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini akan ada regulasi yang tepat dari pemerintah terkait dengan pelestarian kebudayaan dan masyarakat laut suku Sawang di tengah pesatnya pariwisata dan arus globalisasi.
- b. Di persekolahan, dapat dijadikan materi rujukan mengenai kajian sejarah dan kebudayaan Lokal dalam pembelajaran sejarah di Pulau Belitung mengenai Suku Sawang. Selain itu tentunya dapat dijadikan sumber rujukan bagi penulisan karya ilmiah lainnya mengingat sangat sedikit sekali tulisan mengenai Suku Sawang Belitung ini.
- c. Dapat memberikan dan menambah referensi bagi masyarakat mengenai eksistensi Suku Sawang dan kebudayaannya serta mengajak untuk melestarikannya. Selain itu memberikan sumbangan referensi dan pengetahuan bagi para akademisi yang kemudian diharapkan dari peneliti sendiri untuk penelitiannya lebih dikembangkan

## E. Struktur Organisasi Skripsi

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan kemudian disusun ke dalam sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan dari penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya memuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting untuk dikaji, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka. Bab ini berisi tentang berbagai pendapat bersumber pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintah daerah untuk tinggal di darat terhadap kelestarian budaya Suku Sawang di Pulau Belitung tahun 1936-2012.

Bab III, Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang metode dan teknik penelitian yang digunakan penulis dalam mencari sumber-sumber dan cara pengolahan sumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Bab IV, Pembahasan mengenai masyarakat adat Suku Sawang di Pulau Belitung sebagai komunitas adat terpencil dan dinamika sosial-budayanya. Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian tersebut berdasarkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama. Dalam hal ini uraian dibagi ke dalam beberapa bagian, yang *pertama* yaitu mengenai gambaran latar belakang kehidupan Suku Sawang di Belitung sebelum tahun 1936, kemudian *kedua* mengenai dinamika kehidupan Suku Sawang ketika didaratkan untuk pertama kalinya masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda di Belitung tahun 1936 hingga masa pemerintahan Republik Indonesia tahun 1970, yang *ketiga* mengenai faktor-faktor apa sajakah yang mendorong diberlakukannya kebijakan tinggal di darat terhadap Suku Sawang oleh Pemerintah tahun 1936-2012, dan bagian *keempat* adalah mengenai kondisi sosial-budaya, dan ekonomi masyarakat Suku Sawang pasca diberlakukannya kebijakan tinggal di darat bagi Suku Sawang di Belitung tahun 1970-2012.

Bab V, Kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan deskripsi dan beberapa saran yang bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang dibahas.